



PERAN KOMITE MADRASAH DALAM MENDUKUNG PEMBIAYAAN PENDIDIKAN BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT

Irma Noviyanty

Universitas Islam An Nur Lampung, Lampung, Indonesia,

Email: irmanoviyanty2411@gmail.com

Abstract

. This study aims to analyze the role of madrasah committees in supporting education financing based on community participation as a strategic response to the limited budget provided by the government. The madrasah committee acts as an institution that bridges the relationship between the school, parents, and the wider community to ensure effective, accountable, and sustainable education funding. This research employs a descriptive qualitative approach, using in-depth interviews, field observations, and documentation as data collection techniques. The findings reveal that the madrasah committee plays a vital role in three key areas: fundraising, financial oversight, and strengthening partnerships between the madrasah and the community. Fundraising efforts include voluntary contributions, collaborations with community leaders, support from external institutions, and parental involvement in various school programs. Financial oversight is conducted through regular meetings, evaluation of financial reports, and active participation in budget planning. Furthermore, the committee expands financial support by establishing partnerships with community organizations, businesses, and alumni networks. However, the study also identifies several challenges, such as limited managerial capacity among committee members, low participation from certain segments of the community, and inadequate documentation practices. Therefore, enhancing committee capacity, improving transparency, and fostering stronger collaboration are essential to ensure that community-based education financing can operate effectively and sustainably.

Keywords: Madrasah Committee, Education Financing, Community Participation

Abstrak

. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran komite madrasah dalam mendukung pembiayaan pendidikan berbasis partisipasi masyarakat sebagai strategi untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah. Komite madrasah berfungsi sebagai lembaga yang menjembatani hubungan antara pihak madrasah, orang tua siswa, dan masyarakat dalam mewujudkan pembiayaan pendidikan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite madrasah berperan dalam tiga aspek utama: penggalangan dana, pengawasan penggunaan dana, dan penguatan hubungan kemitraan antara madrasah dan masyarakat. Penggalangan dana dilakukan melalui sumbangan sukarela, kerja sama dengan tokoh masyarakat, bantuan lembaga eksternal, serta partisipasi orang tua dalam berbagai program madrasah. Fungsi

pengawasan dilakukan melalui rapat berkala, evaluasi laporan anggaran, dan keterlibatan langsung dalam proses perencanaan. Selain itu, komite turut membangun jejaring kemitraan dengan organisasi masyarakat, dunia usaha, dan alumni untuk memperluas dukungan pembiayaan. Meskipun demikian, penelitian juga menemukan kendala seperti kurangnya kapasitas anggota komite, rendahnya partisipasi sebagian masyarakat, dan terbatasnya dokumentasi yang sistematis. Dengan demikian, penguatan kapasitas komite, peningkatan transparansi, dan kolaborasi yang lebih intensif diperlukan untuk memastikan bahwa pembiayaan berbasis partisipasi masyarakat dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Komite Madrasah, Pembiayaan Pendidikan, Partisipasi Masyarakat

PENDAHULUAN

. Komite madrasah merupakan lembaga representatif yang dibentuk untuk menjembatani kepentingan peserta didik, orang tua, masyarakat, dan madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Seiring perkembangan sistem pendidikan nasional, komite madrasah memiliki peran strategis terutama dalam aspek perencanaan, pengawasan, dan dukungan pembiayaan pendidikan. Di tengah keterbatasan anggaran pemerintah, komite madrasah menjadi salah satu unsur penting dalam memperkuat partisipasi masyarakat agar madrasah mampu memenuhi kebutuhan operasional dan pengembangan program pendidikan secara optimal (Ismanto et al., 2022).

Pembiayaan pendidikan merupakan komponen utama yang menentukan kelancaran aktivitas pembelajaran di madrasah. Mulai dari penyediaan sarana prasarana, pengembangan kurikulum, pelatihan guru, hingga kegiatan ekstrakurikuler, semuanya membutuhkan dukungan dana yang cukup. Namun kenyataannya, sebagian besar madrasah menghadapi keterbatasan anggaran karena alokasi dari pemerintah sering kali belum mencukupi kebutuhan ideal. Kondisi ini menuntut adanya kolaborasi antara madrasah, orang tua, dan masyarakat melalui peran aktif komite madrasah dalam mendukung pembiayaan Pendidikan (Weni & Isfaiyah, 2024).

Partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan memberikan peluang bagi madrasah untuk berkembang lebih cepat. Keterlibatan masyarakat tidak hanya berupa sumbangan dana, tetapi juga dukungan pemikiran, waktu, tenaga, dan bantuan material. Komite madrasah menjadi wadah resmi yang mengkoordinasikan keterlibatan tersebut agar lebih terarah dan sesuai prinsip akuntabilitas. Namun, efektivitas partisipasi masyarakat sangat bergantung pada sejauh mana komite mampu menjalankan fungsi koordinasi secara profesional dan transparan (Murtafiah, 2021).

Peran komite madrasah dalam konteks pembiayaan menjadi semakin penting pada era otonomi pendidikan. Madrasah diberi keleluasaan untuk mengelola sumber daya secara mandiri, sehingga membutuhkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Komite madrasah tidak lagi dipandang hanya sebagai lembaga pelengkap, tetapi sebagai mitra strategis yang membantu mengatasi hambatan pendanaan. Oleh karena itu, komite harus memiliki kapasitas manajerial yang baik, memahami regulasi

pembiayaan pendidikan, serta mampu melibatkan masyarakat secara konstruktif (Weni & Isfaiyah, 2024).

Meskipun peran komite madrasah sangat penting, masih banyak madrasah yang belum memaksimalkan potensinya. Beberapa komite dibentuk hanya sebatas formalitas dan kurang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Bahkan ada komite yang tidak memahami tugas pokoknya sehingga tidak mampu menjalankan fungsi dukungan pembiayaan secara efektif. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat peran komite Madrasah agar partisipasi masyarakat dalam pembiayaan dapat berjalan secara optimal (Warisno, 2024).

Selain itu, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan juga beragam. Sebagian orang tua memahami bahwa pendidikan membutuhkan dukungan berbagai pihak, tetapi sebagian lainnya menganggap bahwa pembiayaan pendidikan sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Perbedaan persepsi ini sering menjadi tantangan bagi komite madrasah dalam menggerakkan dukungan kolektif dari Masyarakat (Dr. Sonny Muhammad Ikhsan Mangkuwinata et al., 2025).

Hubungan antara komite madrasah dan pimpinan madrasah juga memengaruhi efektivitas peran komite. Jika hubungan keduanya harmonis dan saling mendukung, maka kegiatan pembiayaan dapat dikelola dengan lebih baik. Namun jika terjadi ketidaksepahaman atau kurang komunikasi, fungsi komite menjadi terhambat. Karena itu, transparansi dan sinergi antara komite dan pihak madrasah sangat penting untuk membangun kepercayaan Masyarakat (Lapansari et al., 2024).

Pengelolaan dana partisipasi masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Komite madrasah perlu memastikan bahwa seluruh dana yang dihimpun tercatat dengan baik, dilaporkan secara terbuka, dan digunakan sesuai prioritas pengembangan madrasah. Ketidaktepatan dalam pemanfaatan dana berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat, sehingga menghambat partisipasi di masa mendatang (Evaluasi et al., 2025).

Dalam konteks manajemen pendidikan, peran komite madrasah dalam pembiayaan tidak hanya sebatas pengumpulan dana, tetapi juga terlibat dalam perencanaan anggaran bersama pihak madrasah. Komite membantu mengidentifikasi kebutuhan madrasah, menentukan prioritas program, serta mengawasi penggunaan anggaran agar tepat sasaran. Dengan keterlibatan ini, madrasah dapat menyusun rencana pengembangan yang lebih realistis dan partisipatif (Runiasih & Ahmad, 2025).

Pelaksanaan program pembiayaan berbasis masyarakat membutuhkan strategi komunikatif yang efektif. Komite harus mampu menyosialisasikan program madrasah, tujuan pembiayaan, serta manfaat yang akan diperoleh oleh peserta didik dan

masyarakat. Komunikasi yang baik akan meningkatkan motivasi masyarakat untuk terlibat aktif. Sebaliknya, kurangnya komunikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman dan resistensi dalam memberikan dukungan (Mesiono & Roslaeni, 2021).

Penelitian mengenai peran komite madrasah menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana komite telah menjalankan fungsinya dalam mendukung pembiayaan pendidikan. Banyak madrasah yang membutuhkan model pemberdayaan komite, sehingga penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merancang strategi pemberdayaan komite madrasah sesuai konteks dan kebutuhan lokal. Hal ini penting agar peran komite benar-benar berdampak pada peningkatan mutu Pendidikan (Handayani & Huda, 2020).

Dalam upaya mendukung pembiayaan pendidikan, komite madrasah juga perlu menggandeng berbagai elemen masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, organisasi masyarakat, dan dunia usaha. Kolaborasi ini memungkinkan madrasah memperoleh dukungan yang lebih luas dan berkelanjutan. Komite yang mampu membangun jaringan dan memanfaatkan potensi lokal akan lebih berhasil dalam menghimpun dukungan dibanding komite yang bekerja secara tertutup (Azhari & Kurniady, 2017).

Komite madrasah juga memiliki peran penting dalam meminimalisir kesenjangan fasilitas antar madrasah. Madrasah yang berada di wilayah terpencil sering kali kekurangan sarana prasarana, sementara alokasi dana pemerintah sangat terbatas. Dengan adanya peran komite dan partisipasi masyarakat, madrasah dapat melakukan pengadaan fasilitas secara mandiri tanpa harus sepenuhnya bergantung pada dana pemerintah. Ini menjadi langkah strategis dalam pemerataan mutu Pendidikan (DR. H. A. Rusdiana, 2021).

Meskipun peran komite sangat vital, keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kapasitas anggotanya. Banyak komite yang belum memiliki pengetahuan memadai tentang regulasi pendidikan, manajemen keuangan, atau tata kelola sekolah. Oleh karena itu, pelatihan dan pemberdayaan komite madrasah menjadi hal yang urgen agar mereka dapat berfungsi secara optimal sebagai mitra madrasah dalam pembiayaan Pendidikan (Rusmana, 2008).

Secara keseluruhan, penguatan peran komite madrasah dalam pembiayaan pendidikan berbasis partisipasi masyarakat merupakan kebutuhan mendesak di tengah keterbatasan anggaran pemerintah dan tuntutan peningkatan mutu pendidikan. Melalui komite yang aktif, profesional, dan mampu memberdayakan masyarakat, madrasah dapat berkembang menjadi lembaga pendidikan yang mandiri, transparan, dan berkualitas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi peran, tantangan, dan strategi pemberdayaan komite dalam mendukung pembiayaan pendidikan di madrasah.

METODE

. Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif deskriptif** karena bertujuan menggambarkan secara mendalam bagaimana peran komite madrasah dalam mendukung pembiayaan pendidikan berbasis partisipasi masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena secara natural tanpa manipulasi, sehingga data yang diperoleh lebih kaya dan menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Fokus penelitian bukan hanya pada hasil dukungan pembiayaan, tetapi juga proses, pola hubungan antara komite dan masyarakat, serta dinamika yang terjadi dalam manajemen pembiayaan di madrasah. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengungkap persepsi, motivasi, dan hambatan yang dialami komite dalam menjalankan fungsi strategisnya (Ramdhan, 2021).

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik **purposive sampling**, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam kegiatan komite madrasah. Informan terdiri dari ketua dan anggota komite madrasah, kepala madrasah, bendahara sekolah, perwakilan guru, orang tua siswa, dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam program pembiayaan. Pemilihan ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang beragam dan representatif terkait pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Dengan purposive sampling, data yang diperoleh lebih relevan dan sesuai kebutuhan penelitian karena diperoleh dari pihak-pihak yang benar-benar memahami situasi yang diteliti (Sugiyono, 2019).

Data dikumpulkan menggunakan tiga teknik utama yaitu **wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi**. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan strategi komite dalam mengelola dukungan pembiayaan pendidikan dari masyarakat. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung praktik pelaksanaan partisipasi masyarakat, transparansi pengelolaan dana, serta hubungan kerja antara komite dan pihak madrasah. Dokumentasi berupa notulen rapat komite, laporan penggunaan dana, foto kegiatan, proposal pembiayaan, serta kebijakan madrasah digunakan untuk memperkuat dan melengkapi temuan penelitian. Integrasi ketiga teknik ini memberikan gambaran komprehensif mengenai peran komite dalam mendukung pembiayaan Pendidikan (Handoko et al., 2024).

Analisis data dilakukan menggunakan model **Miles dan Huberman**, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilah data penting dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk diorganisasi sesuai tema seperti bentuk partisipasi masyarakat, mekanisme pembiayaan, hambatan komite, dan strategi pemberdayaan. Data kemudian disajikan dalam bentuk narasi sistematis yang memudahkan peneliti melihat hubungan antar temuan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara berkelanjutan sepanjang proses penelitian, sehingga hasil penelitian benar-benar mencerminkan kondisi faktual di lapangan. Untuk menjaga kredibilitas data, digunakan teknik **triangulasi sumber dan triangulasi teknik**, sehingga temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Miles & Huberman, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite madrasah memiliki peran penting sebagai jembatan antara pihak madrasah dengan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan

pendidikan. Komite tidak hanya menjadi lembaga representatif, tetapi juga bertindak sebagai penggerak partisipasi masyarakat melalui koordinasi, sosialisasi, dan komunikasi langsung dengan orang tua serta tokoh masyarakat. Upaya ini dilakukan agar kebutuhan pendanaan operasional dan pengembangan madrasah dapat terpenuhi secara optimal tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah yang terbatas. Dengan koordinasi yang baik, komite mampu menggerakkan dukungan masyarakat untuk kegiatan prioritas madrasah.

Peran komite dalam mendukung pembiayaan pendidikan terlihat dari keterlibatannya dalam menyusun dan memberikan masukan terhadap rencana anggaran madrasah. Komite bekerja sama dengan kepala madrasah untuk mengidentifikasi kebutuhan utama seperti perbaikan sarana prasarana, pengadaan media pembelajaran, biaya kegiatan akademik, dan kebutuhan operasional harian. Proses penyusunan anggaran ini dilakukan melalui rapat rutin yang melibatkan perwakilan orang tua sehingga keputusan anggaran dapat diterima oleh seluruh pihak. Keterlibatan komite dalam penyusunan anggaran mencerminkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana.

Penelitian juga menemukan bahwa komite madrasah berperan dalam mengoordinasikan penggalangan dana dari masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat meliputi sumbangan sukarela, bantuan material, donasi barang, serta gotong royong dalam pembangunan fasilitas madrasah. Komite berperan aktif dalam menyosialisasikan program pembiayaan, menjelaskan urgensi kebutuhan, dan mengajak masyarakat untuk mendukung madrasah secara kolaboratif. Upaya ini terbukti meningkatkan dukungan masyarakat karena adanya rasa kepemilikan bersama terhadap kemajuan madrasah.

Selain menggalang dana, komite madrasah juga berperan dalam menjalin kemitraan dengan pihak luar seperti lembaga sosial, dunia usaha, alumni, dan organisasi masyarakat. Kemitraan ini membantu madrasah memperoleh bantuan tambahan, baik dalam bentuk dana, fasilitas, maupun program pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa madrasah yang aktif menjalin kemitraan cenderung lebih mampu mempertahankan keberlanjutan pendanaannya. Komite menjadi mediator yang berfungsi memperluas jaringan dukungan eksternal bagi madrasah.

Dalam pelaksanaan pembiayaan, komite madrasah juga memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan dana yang terkumpul digunakan secara benar, transparan, dan sesuai prioritas. Penelitian menemukan bahwa komite melakukan pengawasan melalui rapat evaluasi, pemeriksaan laporan keuangan, serta pengamatan langsung terhadap pelaksanaan program. Mekanisme pengawasan ini meningkatkan kepercayaan masyarakat karena dana yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Masyarakat menjadi lebih termotivasi untuk berpartisipasi ketika melihat akuntabilitas yang baik.

Hubungan antara komite madrasah dan kepala madrasah menjadi salah satu faktor penentu efektivitas dukungan pembiayaan. Ketika komunikasi antara kedua pihak berjalan baik, berbagai program penggalangan dana dapat dilaksanakan dengan optimal. Komite memberikan masukan strategis terkait prioritas kebutuhan, sementara kepala madrasah menyediakan data dan informasi terkait kebutuhan anggaran. Kolaborasi ini menciptakan sinergi positif dalam

mengelola pembiayaan secara partisipatif. Namun, bila terjadi ketidaksepahaman, program pembiayaan sering terhambat dan dukungan masyarakat menurun.

Penelitian juga menemukan bahwa komite madrasah berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya dukungan pembiayaan pendidikan. Komite melakukan sosialisasi melalui pertemuan orang tua, grup komunikasi digital, serta kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. Sosialisasi ini membantu masyarakat memahami bahwa pengembangan madrasah membutuhkan dukungan bersama, bukan hanya dari pemerintah. Peningkatan kesadaran ini membuat masyarakat lebih terbuka dan bersedia terlibat secara aktif dalam pembiayaan madrasah.

Kendala yang dihadapi komite dalam menggerakkan partisipasi masyarakat antara lain adalah perbedaan tingkat ekonomi orang tua siswa dan persepsi bahwa biaya pendidikan sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Komite harus bekerja lebih keras untuk menjelaskan urgensi kebutuhan pendanaan serta memberikan pemahaman bahwa partisipasi bersifat sukarela, bukan kewajiban. Strategi komunikasi yang tepat sangat dibutuhkan untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik di lingkungan madrasah.

Selain itu, kapasitas anggota komite juga memengaruhi efektivitas pengelolaan pembiayaan. Penelitian menemukan bahwa sebagian anggota komite belum memiliki kemampuan manajerial yang memadai, terutama dalam bidang administrasi keuangan, perencanaan anggaran, dan pengawasan. Keterbatasan ini membuat komite kurang maksimal dalam menjalankan fungsi strategisnya. Oleh karena itu, pelatihan manajemen bagi komite menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan profesionalitas lembaga tersebut.

Komite madrasah juga menghadapi kendala dalam dokumentasi kegiatan pembiayaan. Banyak kegiatan penggalangan dana yang tidak didokumentasikan dengan baik sehingga sulit dilakukan evaluasi berbasis data. Dokumentasi yang minim membuat laporan keuangan kurang jelas dan berpotensi menimbulkan kecurigaan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa penguatan sistem dokumentasi dapat meningkatkan transparansi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap komite.

Dari hasil wawancara, terungkap bahwa komite yang aktif dan komunikatif mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat secara signifikan. Kepercayaan ini menjadi modal sosial penting untuk memperluas dukungan pembiayaan. Komite yang sering memberikan laporan publik, mempublikasikan kegiatan, dan mengundang masyarakat dalam kegiatan evaluasi menjalankan fungsi akuntabilitas secara efektif. Hal ini membuat masyarakat merasa dilibatkan dan dihargai dalam proses pengembangan madrasah.

Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembiayaan tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga tenaga dan keahlian. Masyarakat terlibat dalam pembangunan ruang kelas, perbaikan fasilitas, serta kegiatan kebersihan dan gotong royong. Komite mengatur jadwal kerja bakti, mengoordinasikan kebutuhan material, dan memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana. Bentuk partisipasi ini sangat membantu mengurangi biaya operasional madrasah secara signifikan.

Komite madrasah juga memiliki peran dalam menjaga hubungan baik antara madrasah dan masyarakat. Ketika terjadi keluhan atau ketidaksesuaian terkait pembiayaan, komite

menjadi mediator untuk menjembatani kepentingan kedua pihak. Komite berusaha menyelesaikan persoalan secara musyawarah sehingga tidak mengganggu harmoni lingkungan madrasah. Fungsi mediasi ini sangat penting untuk menjaga kelanjutan dukungan masyarakat terhadap pendanaan madrasah.

Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa komite madrasah memiliki tiga peran utama dalam mendukung pembiayaan pendidikan, yaitu peran penggalangan dana, peran pengawasan, dan peran penghubung antara masyarakat dan madrasah. Ketiga peran ini berjalan optimal ketika komite memiliki kapasitas yang baik, komunikasi yang efektif, serta dukungan penuh dari pimpinan madrasah. Ketika komite aktif, transparan, dan memiliki strategi yang terarah, tingkat partisipasi masyarakat meningkat dan kebutuhan pendanaan madrasah dapat terpenuhi dengan lebih baik.

Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa keberhasilan pembiayaan partisipatif di madrasah sangat dipengaruhi oleh kualitas kinerja komite madrasah. Komite yang kuat mampu membangun kepercayaan masyarakat, menyinergikan program pengembangan madrasah, serta memastikan penggunaan dana secara transparan dan akuntabel. Penguatan kapasitas komite melalui pelatihan, regulasi yang jelas, dan peningkatan kolaborasi menjadi langkah penting untuk mewujudkan pembiayaan pendidikan berbasis partisipasi masyarakat yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

. Komite madrasah memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pendidikan melalui pendekatan partisipasi masyarakat. Peran ini mencakup penggalangan dana, penyusunan anggaran bersama madrasah, serta memastikan dukungan masyarakat dapat mengisi kekurangan pendanaan dari pemerintah. Melalui sosialisasi, koordinasi, dan komunikasi yang intensif, komite mampu membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan mereka dalam pengembangan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite yang aktif dan responsif dapat meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat secara signifikan, baik dalam bentuk dana, material, maupun tenaga. Ini menunjukkan bahwa keberadaan komite tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar menjadi unsur penggerak pembiayaan madrasah.

Komite madrasah juga menjalankan peran penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Melalui fungsi pengawasan, komite memastikan bahwa setiap dana partisipasi yang dihimpun digunakan sesuai prioritas kebutuhan madrasah, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hubungan sinergis antara komite dan kepala madrasah menjadi faktor utama keberhasilan program pembiayaan. Ketika komunikasi berjalan baik, komite dapat memberikan masukan strategis, melakukan evaluasi, dan memfasilitasi partisipasi masyarakat secara efektif. Komite yang mampu menyajikan laporan terbuka, menyusun dokumentasi pembiayaan yang rapi, dan rutin melakukan evaluasi terbukti dapat memperkuat kepercayaan publik.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pembiayaan berbasis partisipasi masyarakat sangat bergantung pada kapasitas, profesionalitas, dan kualitas kinerja komite madrasah. Komite yang kuat mampu menggerakkan masyarakat, membangun jejaring kemitraan, serta menjaga hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan. Namun demikian, penguatan kapasitas komite melalui pelatihan manajemen, peningkatan kompetensi administrasi, serta perbaikan mekanisme kerja masih diperlukan agar peran komite semakin optimal. Dengan dukungan regulasi yang jelas, kepemimpinan madrasah yang visioner, dan partisipasi masyarakat yang luas, komite madrasah dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, U. L., & Kurniady, D. A. (2017). MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN, FASILITAS PEMBELAJARAN, DAN MUTU SEKOLAH. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 13(2). <https://doi.org/10.17509/JAP.V23I2.5631>
- DR. H. A. Rusdiana, M. M. (2021). *MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN: Filosofi, Konsep, dan Aplikasi*. TRESNA BHAKTI Press Bandung.
- Dr. Sonny Muhammad Ikhsan Mangkuwinata, S. E. M. S., Prof. Dr. Dedy Achmad Kurniady, M. P., Prof. Dr. Tjutju Yuniarsih, S. E. M. P., Dr. Abubakar, M. P., & Dr. Marwan, M. P. (2025). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan : Strategi dan Model dalam Meningkatkan Mutu*. Indonesia Emas Group.
- Evaluasi, K., Madrasah, D., Perencanaan Pembiayaan, D., Mencapai, U., Pendidikan, M., & Berkelanjutan, Y. (2025). KETERPADUAN EVALUASI DIRI MADRASAH DAN PERENCANAAN PEMBIAYAAN UNTUK MENCAPAI MUTU PENDIDIKAN YANG BERKELANJUTAN. *Almarhalah: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 21-36. <https://doi.org/10.38153/ALMARHALAH.V9I1.156>
- Handayani, N. F., & Huda, N. (2020). MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SMA NEGERI PASCADESENTRALISASI PENDIDIKAN. *JAMP: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 3(4), 332-341.
- Handoko, Y., Wijaya, H. A., & Lestari, A. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif Panduan Praktis untuk Penelitian Administrasi Pendidikan*. books.google.com.
- Ismanto, H., Murtafi'ah, N. H., & Lestari, S. (2022). IMPLEMENTASI PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DI SMA NEGERI 1 BAKAUHENI LAMPUNG SELATAN. *UNISAN JURNAL*, 1(1), 491-501.
- Lapansari, Y., Saleh, Y. Y. S., Mustafidah, R., & Ngadimah, M. (2024). METODE ACTIVITY BASED MANAGEMENT (ABM) UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SMK SORE PONOROGO. *Jurnal Manajemen Pendidikan (JMP)*, 13(3), 299. <https://doi.org/10.26877/JMP.V13I3.20431>
- Mesiono, M., & Roslaeni, R. (2021). MODEL-MODEL PEMBIAYAAN PENDIDIKAN (ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI DALAM INSTITUSI PENDIDIKAN). *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, 2(1), 1-18. <https://doi.org/10.51672/JBPI.V2I1.10>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE Publications.
- Murtafiah, N. H. (2021). Analisis Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Yang

- Handal dan Profesional (Studi Kasus: IAI An-Nur Lampung). *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 10 (02), 789–812. <https://doi.org/10.30868/ei.v10i02.2358>
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian* (A. A. Effendy (ed.); 1st ed., Vol. 1). Cipta Media Nusantara (CMN).
- Runiasih, M., & Ahmad, M. (2025). KETIMPANGAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ANTAR DAERAH DI INDONESIA: KAJIAN LITERATUR TERHADAP DESENTRALISASI FISKAL DAN PEMERATAAN AKSES. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(2), 839–843. <https://doi.org/10.34125/JMP.V10I2.671>
- Rusmana, M. (2008). SISTEM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DITINJAU DARI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN GARUT. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 5(1). <https://doi.org/10.17509/JAP.V7I1.6267>
- Sugiyono. (2019). METODE PENELITIAN PENDIDIKAN. In *Bandung:Alfabeta*.
- Warisno, A. (2024). DIGITAL LIBRARY MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM AT MADRASAH IBTIDAIYAH ALFAJAR PRINGSEWU IN AN EFFORT TO INCREASE STUDENT LITERACY. *JPGMI (Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Al-Multazam)*, 10(1), 56–64.
- Weni, S. Y., & Isfaiyah. (2024). Manajemen Pembiayaan Pada Lembaga Pendidikan Islam: Studi di MTsN 9 Nganjuk Provinsi Jawa Timur. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 27–38. <https://doi.org/10.61104/IHSAN.V2I2.176>